

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sampai dengan Pelita III, mekanisme pembangunan prasarana kota masih sangat diwarnai dengan pendekatan penyusunan program sektoral terpusat. Pendekatan ini lebih menitikberatkan pada penggunaan sumber-sumber pendanaan yang berasal dari anggaran Pembangunan dan Belanja Negara (APBN) dengan alokasi dana menurut program-program sektoral. Sebagai akibatnya, pelaksanaan proyek-proyek yang bersifat sektoral.

Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan secara sektoral dan terpusat berakibat pula terhadap operasi dan pemeliharaan. Pendekatan ini pada kenyataannya belum mempertimbangkan sepenuhnya kemampuan daerah dalam menyediakan anggaran pemeliharaan yang harus dipikul oleh Pemerintah Daerah setelah proyek selesai. Kurangnya keterlibatan Pemerintah Daerah dalam perencanaan (Pemrograman) dan pelaksanaan pembangunan prasarana kota mengakibatkan Pemerintah Daerah tidak siap menerima tanggung jawab operasi dan pemeliharaan atas prasarana kota yang dibangun lewat program sektoral pusat.

Pengalaman tersebut mendorong Pemerintah Pusat untuk menerapkan kebijaksanaan pembangunan prasarana kota yang mengarah kepada keterpaduan antar sektor. Gagasan ini semakin kuat sejalan dengan berkurangnya kemampuan Pemerintah Pusat dalam menyediakan anggaran guna pembangunan prasarana kota sebagai akibat menurunnya penerimaan Pemerintah Pusat dari sektor minyak dan gas bumi yang mendorong perlunya penyerahan nyata tanggung jawab pembangunan prasarana kota kepada Pemerintah Daerah tingkat II

Memasuki Pelita IV, dan berbekal Peraturan Pemerintah Nomor 1987. Pemerintah secara resmi memperkenalkan pendekatan baru dalam menangani pembangunan prasarana kota di Indonesia yang dikenal dengan Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu (P3KT) atau Integrated

Urban Infrastructure Development Programme (UIDP). Pendekatan P3KT ini dalam Pelita V telah dicantumkan sebagai kebijaksanaan dalam pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan prasarana kota.

Program-program P3KT disusun dengan memadukan perencanaan tata ruang kota dan komponen sektoral, memobilisasi sumber-sumber danan, menyesuaikan program-program dengan kebutuhan daerah, serta pemberian peran yang lebih besar kepada Pemda Kabupaten / Kota. Pemerintah Pusat memberikan pedoman kepada Pemda Kabupaten / Kota dalam penyiapan program prasarana perkotaan, meliputi : Standar Nasional untuk setiap jenis prasarana kota ; standar teknis ; masing-masing prasarana kota ; indikasi sumber dana yang tersedia dari Pemerintah Pusat dan bantuan atau pinjaman luar negeri yang telah disepakati. Kemudian, Pemerintah Pemda Kabupaten / Kota Menyiapkan program-program berdasarkan pedoman yang ditetapkan Pemerintah Pusat untuk proses perencanaan, dengan modifikasi-modifikasi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan setempat. Program-program diusulkan setelah memenuhi standar-standar teknis, disamping memperhatikan kemampuan keuangan dan kelembagaan semua pihak yang terkait. Dalam penyiapan program, pemda Kabupaten / Kota didukung oleh staf Pemerintah Daerah Propinsi dan sektoral (Perwakilan Pusat Di Kabupaten / Kota).

Pembangunan prasarana kota secara terpadu ini bertujuan untuk :

- Meningkatkan kondisi lingkungan dan kesehatan masyarakat di perkotaan
- Meningkatkan kemampuan kelembagaan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan prasarana kota.
- Meningkatkan kemampuan keuangan daerah dalam melaksanakan pembangunan, mengoperasikan dan memelihara sarana dan prasarana.
- Mempercepat partisipasi swasta dan masyarakat dalam pembangunan prasarana dasar pemukiman.

Di Jawa Barat untuk pelaksanaan program prasarana terpadu ini sudah dimulai sejak tahun 1984 melalui beberapa program-program pembangunan di perkotaan yang dibiayai dari bantuan luar negeri, salah satu program tersebut program Bogor – Palembang Urban dengan lokasi di Kabupaten Bogor, Kota

Bogor dan Kota Palembang, dengan pendanaan dari Asian Development Bank (ADB), Pemerintah Pusat, Propinsi dan dari Pemda Kabupaten / Kota serta PDAM.

Program tersebut sebagai sarana penyediaan prasarana kota yang antara lain penyediaan Air bersih, Drainase, persampahan, jalan kota, Sanitasi, Perbaikan kampung (KIP) dan Perbaikan Pasar CMIP, begitu juga merupakan promosi dari pola desentralisasi, peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah dan juga meningkatkan kemampuan mengenai perkotaan tingkat Pemerintah Daerah.

Bogor – Palembang Urban Development Project (Bopal UDP) ini meliputi daerah perkotaan di Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan Kota Palembang.

Bogor – Palembang UDP memberi andil untuk pertumbuhan kegiatan ekonomi dengan peningkatan penyediaan air bersih, perbaikan jalan kota dan kondisi lalu-lintas, meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat.

Banyaknya faktor masalah yang ada dalam pelaksanaan Bogor – Palembang UDP ini yang antara lain :

- Bahwa program ini sifatnya masih terpusat sehingga Pemerintah Daerah wewenangnya terbatas.
- Keterpaduan dalam pelaksanaan program belum berjalan dengan baik serta masyarakat belum jelas mengenai program Bogor – Palembang UDP ini.

Sehubungan dengan hal yang di atas muncul pertanyaan studi, sejauh mana konsep manajemen penyediaan prasarana kota yang digunakan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat dan manfaat bagi pembangunan yang masa datang sesuai kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah serta sesuai dengan perencanaan dan target sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pada banyaknya permasalahan yang ada dalam pelaksanaan maka dalam penulisan ini hanya mengevaluasi manfaat yang didapat dari Proyek BOPAL untuk sektor KIP di Kabupaten Bogor yang mana tujuan dari proyek di sektor KIP ini adalah untuk memperbaiki taraf hidup

masyarakat berpenghasilan rendah dengan cara memperbaiki dan meningkatkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat perkamupungan.

B. Tujuan

Studi ini mengevaluasi pembangunan prasarana kota yang sudah dilaksanakan melalui pendekatan P3KT di Kabupaten Bogor sehingga tujuan dari studi ini adalah :

1. Untuk mengevaluasi sejauh mana manfaat proyek Bogor – Palembang UDP untuk sektor KIP di Kabupaten Bogor bagi masyarakat dan pemerintah.
2. Untuk memberikan rekomendasi yang tepat dan sesuai untuk perencanaan pembangunan perkotaan yang akan datang sehingga akan lebih memberikan manfaat bagi pelaksanaan dalam jangka panjang.